

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Robert Huckshom dalam buku teksnya yang berjudul *Political Parties in America* memberikan sebuah definisi pragmatis tentang partai, yaitu: partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan. Bagi Huckshom, *raison d'etat* (kepentingan negara) untuk memiliki partai politik merupakan hal yang sederhana, dimana partai merupakan sebuah sarana yang diperlukan untuk memenangi pemilu dan memimpin pemerintahan.<sup>1</sup>

Ichlasul Amal (1988) sebagaimana dikutip oleh Kadir (2016) mengemukakan bahwa partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai politik sebagai suatu organisasi secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta memberikan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai. Oleh karena itu, menurut Amal partai politik dalam kepentingan modern dapat dirumuskan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi

---

<sup>1</sup> Richard S. Katz dan William Crotty. *Handbook Partai Politik*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 3

jabatan politik untuk dipilih rakyat sehingga dapat mengawasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.<sup>2</sup>

Setiap partai politik memiliki basis sosiologis, basis sosiologis dari setiap partai tersebut yaitu merupakan ideologi serta kepentingan yang diarahkan untuk mendapatkan kekuasaan. Ideologi politik merupakan himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan, suatu *weltanschauung* (pandangan umum), yang dimiliki oleh individu atau sekelompok orang dengan dasar apa ia menentukan sikapnya dan yang menentukan perilaku politiknya.<sup>3</sup>

Perkembangan partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat, dimulai dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan kemudian diikutsertakan dalam proses politik, berdasarkan hal tersebut partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang yang kemudian menjadi sarana penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Akhir dekade 18 merupakan awal dari perkembangan partai politik di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis, dalam kegiatan politik tersebut dipusatkan pada kelompok-kelompok politik yang berada dalam parlemen. Pada awalnya, kegiatan ini memiliki sifat elitis dan aristokratis, dengan mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Kegiatan politik berkembang sampai ke luar parlemen dengan dibentuknya panitia-panitia pemilihan yang bertugas untuk mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang waktu pemilihan umum (*caucus party*), hal tersebut karena terjadinya perluasan hak pilih. Organisasi massa dikembangkan oleh kelompok-kelompok politik dalam parlemen, hal

---

<sup>2</sup> A. Gau Kadir, *Dinamika Partai Politik di Indonesia*. Sosiohumaniora. Vol 16 No. 2, Juli 2014, hlm. 132.

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm.45

tersebut karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari pelbagai golongan masyarakat,. Berdasarkan hal tersebut pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik.<sup>4</sup>

Di Indonesia, masyarakat telah akrab dengan kehidupan partai-partai politik sebelum Republik Indonesia berdiri, partai politik telah berfungsi dan berperan tampil sebagai wadah perjuangan yang menggelorakan semangat nasionalisme. Setelah proklamasi kemerdekaan, berdasarkan pada Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah menyukai lahirnya partai-partai politik. Mengacu pada keputusan tersebut, keberadaan partai politik semakin marak dengan banyak lahirnya partai politik. Hal tersebut bertujuan agar semua aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat di pimpin ke jalan yang teratur. Meski demikian, fungsi dan peranan partai politik di Indonesia mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan partai politik saat itu.<sup>5</sup>

Keberadaan partai politik di negara demokratis tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Partai politik dianggap sebagai salah satu institusi yang mampu mengakomodir aspirasi rakyat dan dapat dijadikan sebagai alat kontrol bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Partai politik diharapkan mampu menjadi pilar utama penyangga berjalannya kehidupan demokrasi, dalam arti lain bahwa partai politik haruslah ada apabila ingin demokrasi itu berjalan dengan baik. Reformasi telah membuka kesempatan akan keberadaan partai politik melalui pendiriannya. Kehadiran partai-partai baru dinilai memiliki berbagai motif dalam pendirian partai politik itu sendiri, antara lain : (1) motif kekuasaan, (2) motif kekuasaan pragmatis,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 397

<sup>5</sup> Katz dan Crotty., Op.cit. hlm. 134

(3) motif ekonomi, (4) *Bargaining position*, (5) Transaksional. Kondisi tersebut menyebabkan partai tidak lebih dari orang-orang yang mengharapkan kekuasaan.<sup>6</sup>

Konstelasi partai politik di Indonesia berubah setelah Presiden Soeharto resmi menjadi presiden pada tahun 1966 melalui keputusan presiden. Ketika memasuki periode 1970-an presiden Soeharto memberlakukan suatu kebijakan yang dinamakan destrukturisasi partai. Destrukturisasi partai tersebut merupakan satu upaya dalam menyederhakan partai politik yang jumlahnya bisa dikatakan banyak. Dari proses tersebut, kemudian dipolarisasikan menurut tiga ideologi besar yaitu, Golongan Karya, Agama dan Nasionalisme. Berkat kebijakan tersebut lahirlah PPP sebagai perwakilan dari kelompok beraliran agama.<sup>7</sup>

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu partai bentukan Orde Baru yang di deklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973, selain Golkar (Golongan Karya) dan PDI. Seperti yang telah dijelaskan di atas, Partai Persatuan Pembangunan sendiri dibentuk karena adanya peraturan Presiden Soeharto tentang penyederhanaan partai berdasarkan tiga ideologi besar yaitu Golkar, Agama dan Nasionalisme. Partai Persatuan Pembangunan merupakan hasil fusi dari empat partai Islam kecil yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, dan Perti. Pada saat itu diketuai sementara oleh H.M.S Mintaredja SH. Tujuan dari penggabungan empat partai Agama tersebut sebagai upaya dalam penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973. Partai Persatuan Pembangunan didirikan oleh lima deklaratator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta

---

<sup>6</sup> Gustiana A. Kambo, *Kekuatan Golkar di Toraja Utara*. Kritis. Vol 2 No. 2. Des 2016.hlm 98

<sup>7</sup> Kahfi Ananda Giatama – Ibnu Sodik, *Sejarah Perjalanan PPP Pasca Orde Baru: Dinamika Politik dalam Mengatasi Konflik Internal Partai*. Journal of Indonesian History. Vol 4 No. 1, Oktober 2015. Hlm 33

pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, sejenis fraksi 4 (empat) partai Islam di DPR. Para deklarator tersebut adalah;

1. KH. Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
2. H.Mohamad Syafa'at Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
3. Haji Anwar Tjokroaminoto , Ketua Umum PSII;
4. Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam; dan  
Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.<sup>8</sup>

Tasikmalaya menjadi basis dari kekuatan Partai Persatuan Pembangunan, dimana sejak pemilu tahun 1999 Partai Persatuan Pembangunan selalu mendapatkan perolehan suara terbanyak dan hal tersebut menjadikan Tasikmalaya sebagai salah satu basis PPP secara nasional.<sup>9</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kader maupun calon legislatif yang di usung oleh PPP yang memenangkan pemilu legislatif dari setiap periode. Tidak hanya dalam pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah di Kota Tasikmalaya dalam beberapa periode terakhir selalu dimenangkan oleh calon yang di usung Partai Persatuan Pembangunan. Sebagai bahan referensi, berikut disertakan jumlah perolehan suara pada pemilu legislatif Kota Tasikmalaya selama 2 periode terakhir.

---

<sup>8</sup> *Sejarah Partai Persatuan Pembangunan*, <http://digilib.unila.ac.id/13370/17/BAB%20IV.pdf> diakses pada 15 Januari 2019

<sup>9</sup> Nurlatipah Nasir, *Kyai dan Islam dalam Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Tasikmalaya*. Politik Profetik. Vol 6 No. 2. 2015. Hlm 28

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Perolehan Kursi Legislatif di DPRD Kota Tasikmalaya**  
**Tahun 2009-2014**

2009		2014	
<b>PPP</b>	<b>8 Kursi</b>	<b>PPP</b>	<b>10 Kursi</b>
Golkar	4 Kursi	Golkar	5 Kursi
PDIP	5 Kursi	PDIP	7 Kursi
Demokrat	8 Kursi	Demokrat	4 Kursi
PKS	4 Kursi	PKS	4 Kursi
PKB	1 Kursi	PKB	2 Kursi
PAN	7 Kursi	PAN	5 Kursi
Gerindra	1 Kursi	Gerindra	4 Kursi
PBB	3 Kursi	PBB	1 Kursi
PBR	4 Kursi	Nasdem	3 Kursi
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>45</b>

Sumber : kota-tasikmalaya.kpu.go.id

Partai Persatuan Pembangunan menjadi salah satu partai pengusung pasangan Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Terdapat empat pasangan calon yang ikut berkompetisi, berikut disertakan masing-masing pasangan calon serta partai pengusung dan hasil perolehan suara.

**Tabel 1.2**  
**Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 di Kota**  
**Tasikmalaya**

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1.	Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum	PPP – PKB – Hanura – NasDem	27,59 %

2.	Hasanuddin – Anton Charliyan	PDIP	9,45 %
3.	<b>Sudrajat – Ahmad Syaikhu</b>	<b>Gerindra – PKS – PAN</b>	<b>43,53 %</b>
4.	Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi	Golkar – Demokrat	19,42 %

Sumber : kota-tasikmalaya.kpu.go.id

Dengan banyaknya dukungan dari partai koalisi serta didukung oleh basis sosiologis masyarakat Tasikmalaya yang cenderung lebih mengikut pada instruksi kyai dengan alasan yang sederhana, bahwa peran kyai sangatlah besar dan cukup vital dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat di Tasikmalaya, bahkan kepemimpinannya melebihi kapasitas seorang pemimpin legal formal seperti lurah atau camat dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks perpolitikan saat ini, kyai merupakan tokoh sentral sebagai *vote getter* (pengumpul suara) dalam pemilu, baik ruang lingkup nasional maupun politik.<sup>10</sup> Hasil dari rekapitulasi suara diatas menunjukkan pasangan Rindu memperoleh suara sebanyak 27,59% yang artinya kalah di tingkat Kota Tasikmalaya, kekalahan pasangan Rindu di Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh faktor luar seperti adanya dualisme kepemimpinan di tingkat pusat dan isu 2019 ganti presiden yang merupakan bagian dari Pilkada DKI Jakarta 2017.<sup>11</sup> Selain itu juga karena adanya ketidaksukaan masyarakat Kota Tasikmalaya terhadap sosok Uu Ruzhanul ulum.<sup>12</sup>

Perolehan suara tersebut merupakan satu kondisi yang jauh dari prediksi serta target yang ditentukan sebesar 80%, target 80% dinilai realistis mengingat

<sup>10</sup> Edi Kusmayadi dan Subhan Agung dan M. Ali Andrias. *Model Kepemimpinan Politik Kyai: Studi Peran Kyai dalam Pergeseran Perilaku Politik Massa NU PKB dan PPP*. Politika, Vol 7 No. 2, Oktober 2016. Hlm 22

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ramdani Mun'in selaku Wakil Ketua PPP dan Ketua Tim Pemenangan Rindu Kota Tasikmalaya di Sekretariat DPC PPP Kota Tasikmalaya

<sup>12</sup> Wawancara dengan Endi Sagita Pratama selaku bagian Kesekretariatan DPC PPP Kota Tasikmalaya dan Kesekretariatan Tim Pemenangan Rindu Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya sendiri merupakan basis dari Partai Persatuan Pembangunan yang menjadi salah pengusung pasangan Rindu dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Kekuatan Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemenangan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 di Kota Tasikmalaya?

## **C. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini dibuatkan batasan masalah dengan tujuan penulis bisa fokus pada pembahasan yang diajukan dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud dalam usulan penelitian. Penelitian ini dibatasi hanya pada ruang lingkup tentang Analisis Kekuatan Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 (Studi Kekalahan Pasangan Rindu di Kota Tasikmalaya). Dengan fokus kajian pada pelebagaan partai.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui bagaimana kekuatan Partai Persatuan Pembangunan dalam memenangkan pasangan Rindu pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 di Kota Tasikmalaya.

---

<sup>13</sup> Endi Sagita Pratama, *Ibid*

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian teori-teori sosial dan politik. Selain itu juga dalam penulisan ini penulis berharap tulisan ini dapat berguna sebagai sarana untuk melatih serta mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah secara sistematis dan metodologis.

### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan kontribusi yang berkaitan dengan data dan informasi yang dapat digunakan untuk membantu penelitian lebih lanjut bagi peneliti-peneliti lainnya terutama yang berkaitan dengan analisis kekuatan Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 di Kota Tasikmalaya. Sebagai kajian ilmiah bagi penulis selaku insan akademis dalam melaksanakan penelitian.